



**P E N E T A P A N**

**Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Agustam alias Gustam bin Tinggi**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

- **Aulia Rahmat, SH.MH.** Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kompleks Perumahan Husada Permai, blok B4, No 1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama watansoppeng Nomor : 85/SK.Daf/2021/PA.Wsp, tertanggal 5 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon buktinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 4 Februari 2021, tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Nur Anisa binti Agustam alias Gustam berstatus gadis, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 22 Juli 2004.
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu (tahun 2018) telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan 68/Pdt.P/2021/PA.WSP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak bernama Surianto bin Latajang, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Laringgi, Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi.
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng namun ditolak dengan nomor penolakan B-0100/kua/21.20.06/Pw.01/02/2021, tertanggal 3 Februari 2021, dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua 100 persen, karena anak Pemohon bekerja sebagai karyawan penjual pakaian di pasar dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 500.000.-  
Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan permusim panen (4 atau 6 bulan) sebesar Rp 7.500.000.- sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga.
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan 68/Pdt.P/2021/PA.WSP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nur Anisa binti Agustam alias Gustam) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Suriyanto bin Latajang)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

### Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga, An. Gustam yang didalamnya termuat nama Nur Anisa dengan Nomor 7312053009110001 bertanggal 15 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan 68/Pdt.P/2021/PA.WSP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nur Anisa dengan Nomor 7313-LT-04022014-0035 Tanggal 4 Februari 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Wajo, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Nur Anisa Nomor B-0100/kua/21.20.06/Pw.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng bertanggal 3 Februari 2021, dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Hasim bin Jabba dan Riswan bin Lakufe selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Nur Anisa dengan seorang laki-laki bernama Surianto bin Latajang, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Nur Anisa tersebut masih berumur 17 tahun lebih, sehingga secara hukum anak

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan 68/Pdt.P/2021/PA.WSP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar dua tahun lama dan telah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi Pemohon telah menerima uang panai dari pihak

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan 68/Pdt.P/2021/PA.WSP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nur Anisa binti Agustam alias Gustam** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Surianto bin Latajang** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Nur Anisa binti Agustam alias Gustam**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Surianto bin Latajang**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Muhammad Yunus,Amd.Hk.,S.E sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan 68/Pdt.P/2021/PA.WSP.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Yunus, Amd.Hk., S.E**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	109.000,00

( seratus sembilan ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon pada tanggal 17 Februari 2021 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera

Pengadilan Agama watansoppeng

**Lukman Patawari, S.H**

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan 68/Pdt.P/2021/PA.WSP.